



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Desember 2024/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DIDIT HERDIAWAN**
2. Jabatan : **WAKIL MENTERI**
3. NHK : **94931**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 101.504.212.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1880 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 24.015.240.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 2037 m2/500 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 50.919.125.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1290 m2/500 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 17.575.670.000
4. Tanah Seluas 662 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 4.609.506.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 1.536.417.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 226 m2/42 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 2.848.254.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 1.650.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. MOBIL, TOYOTA TOYOTA FORTUNER Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
3. MOBIL, TOYOTA TOYOTA ALPHARD Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 275.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.086.835.975
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	104.516.047.975
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	104.516.047.975

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.